



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu ditetapkan Program Pembentukan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Memperhatikan :**

1. Berita Acara Rapat Kerja DPRD Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka Pembahasan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 tanggal 18 November 2024;
2. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor: 180/13/HUK dan Nomor:170/11.31/DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025.

#### **M E M U T U S K A N:**

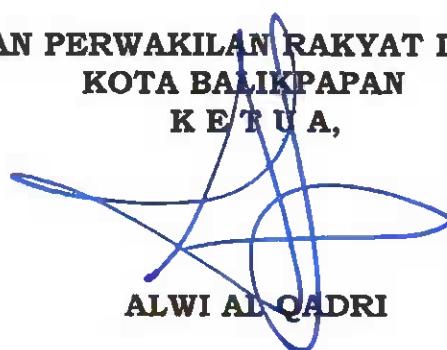
**Menetapkan :**

- KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Balikpapan Tahun 2025 sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Rancangan Peraturan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Propemperda Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
1. 15 (Lima Belas Belas) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan; dan
  2. 11 (Sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Dalam Propemperda 2025 Kota Balikpapan dapat dimuat Daftar Kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. Akibat putusan Mahkamah Agung;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; dan
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- KELIMA : Dalam keadaan tertentu, DPRD Kota Balikpapan atau Wali Kota Balikpapan dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 20 November 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN  
K E T U A,**



ALWI AL QADRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1.Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
- 2.Wali Kota Balikpapan di Balikpapan.
- 3.Arsip

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR TAHUN 2024**  
**TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025**

**Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Balikpapan**  
**Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025**

NO	JUDUL PERATURAN	MATERI POKOK	INISIATOR	STATUS		PERANGKAT DAERAH
				BARU	PENYEMPURNAAN	
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame	Penyelenggaraan Reklame	DPRD	✓		
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	DPRD		✓	
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	DPRD	✓		
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan	Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan	DPRD		✓	
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedauratuan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Kedauratuan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	DPRD	✓		

6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan	Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan	DPRD	✓
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	DPRD	✓
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan	DPRD	✓
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertumbuhan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPRD	✓
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan	Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan	DPRD	✓
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan	Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan	DPRD	✓
12	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Ramah Lanjut Usia	Kota Ramah Lanjut Usia	DPRD	✓

13	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren	Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren	DPRD	✓
14	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Penyelenggaraan Keolahragaan	DPRD	✓
15	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2026-2036	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2026-2036	DPRD	✓
16	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	PEMKOT	✓
17	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pembelian Kemudahan Investasi	Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi	PEMKOT	✓
18	Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah	Sistem Kesehatan Daerah	PEMKOT	✓
19	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok	Kawasan Tanpa Rokok	PEMKOT	✓

20	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan Tahun 2024-2044	Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan Tahun 2024-2044	PEMKOT	✓	
21	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak	Kota Layak Anak	PEMKOT	✓	
22	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Gudang	Penataan dan Pembinaan Gudang	PEMKOT	✓	
23	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga	Pembentukan Rukun Tetangga		✓	
24	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045		✓	
25	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan Gender		✓	
26	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029		✓	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

K E T U A ,

ALWI AL QADRI